

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Disajikan sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Menperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh:

POPI LARICI

BP/NIM : 2012/1202763

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT**

Nama : Popi Lariel
NIM/TM : 1202763/2012
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Ali Anis, Ms
NIP.19591129 198602 1 001

Pembimbing II



Dewi Zaini Putri, S.E., M.M
NIP.19850804 200812 2 003

**Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi**



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

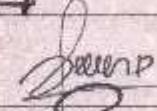
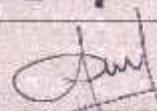
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT**

Nama : Popi Larici
NIM/TM : 1202763/2012
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Drs. Ali Anis, MS	1. 
2	Sekretaris	: Dewi Zaini Putri, SE, MM	2. 
3	Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	3. 
4	Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	4. 

ABSTRAK

Popi Larici (1202763/2012): Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. Di bawah bimbingan bapak Drs.Ali Anis, MS dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD secara parsial terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.(3) Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (4) Pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD secara bersama-sama terhadap belanja modal di Sumatera Barat (5) Pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu menggunakan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan menggunakan pendekatan *fixed Effect Model (FEM)* untuk persamaan 1 dan 2 dan *Random Effect Model (FEM)* untuk persamaan 3. Analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari; (1) Mean (2) Standar Deviasi (3) Koefisien Variasi. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup:(1) Analisis model regresi.(2) Uji asumsi klasik (3) Koefisien Determinasi. (4) Uji t dan Uji F.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Derajat Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh positif signifikan dengan nilai probabilitas 0.0159 terhadap belanja modal, Ketergantungan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan probabilitas sebesar 0.0707 terhadap belanja modal, dan Efektifitas PAD secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan probabilitas sebesar 0.5604 terhadap belanja modal Di Sumatera Barat.(2) Derajat Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh negatif signifikan dengan nilai probabilitas 0.005 terhadap pertumbuhan ekonomi, Ketergantungan keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan probabilitas sebesar 0.4825 terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Efektifitas PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan dengan probabilitas sebesar 0.0124 terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. (3)Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar 0.0009.(4) Derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Barat Artinya, secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan daerah dengan baik keuangan daerah itu memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan diperlukannya pengawasan dalam RAPBD agar tidak terjadi penyelewengan dana APBD sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Alokasi Belanja Modal, Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Efektifitas PAD

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kahadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Ali Anis, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM selaku pembimbing II yang telah memberi ilmu, pengetahuan, waktu, dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idris, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi.
3. Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Ibu Ariusni, SE, M.Si selaku penguji skripsi yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi terutama dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi.
6. Teristimewa penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Ayah Payar dan Ibu Nurlela beserta kanda Nafrizon S.HI tersayang yang memberikan semangat selalu dan tersayang Naufal Afkar dan adikku Iskandar Faizul serta anggota keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
7. Sahabat yang selalu mendukung Cici Novia Erlanda, SE, Destri Wahyuni, Tia Elfitenti terima kasih atas canda tawa, doa, bantuan dan motivasinya.
8. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi terutama angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan. Untuk itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Perumusan Masalah	16
C Tujuan Penelitian	16
D Manfaat Penelitian	17
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS.	
A Kajian Teoritis	
1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	18
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi	21
3. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	24
4. Peranan Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi	31
5. Alokasi Belanja Modal	35
6. Keuangan Daerah	42
7. Kinerja Keuangan Daerah	45
B Penelitian Terdahulu	49
C Kerangka Konseptual	50
D Hipotesis	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Defenisi Operasional	55
F. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	66
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	67
2. Analisis Deskriptif	68
a. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat	68
b. Perkembangan Alokasi Belanja Modal Di Sumatera Barat	71
c. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Di Sumatera Barat	74
d. Perkembangan Ketergantungan Keuangan Daerah Di Sumatera Barat	76
e. Perkembangan Efektifitas PAD Di Sumatera Barat	82

3. Analisis Induktif	
a. Pemilihan Model Regresi Panel Persamaan 1,2, dan 3	85 94,104
b. Uji Asumsi Klasik Persamaan 1,2 dan 3	88 89
c. Koefisien Determinasi (R^2) Persamaan 1,2, dan 3	92 101
d. Pengujian Hipotesis Persamaan 1,2, dan 3	93 102
	106
B. Pembahasan	
1. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Efektifitas PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Sumatera Barat	107
2. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Efektifitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat	115
3. Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	117
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124

Tabel	DAFTAR TABEL	Hal
1.	Tabel Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2012-2016	2
2.	Kinerja Keuangan Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabuapten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014- 2016	6
3.	Kinerja Keuangan Daerah Dan Alokasi Belanja Modal Kabuapten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2016	11
4.	Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabuapten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2016	14
5.	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Kab / Kota Diprovinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016	68
6.	Perkembangan Alokasi Belanja Modal Di Setiap Kab / Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016	71
7.	Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Di Setiap Kab / Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016	74
8.	Perkembangan Ketergantungan Keuangan Daerah Di Setiap Kab / Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016	76
9.	Perkembangan Efektifitas PAD Di Setiap Kab / Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016	82
10.	Hasil Uji Chow-Test Untuk Persamaan 1	86
11.	Hasil Uji Hausman-Test Untuk Persamaan 1	87
12.	Hasil Estimasi Regresi Panel Persamaan 1	88
13.	Hasil Uji Chow-Test Untuk Persamaan 2	94
14.	Hasil Ujihausman Test Untuk Persamaan 2	95
15.	Hasil Estimasi Regresi Panel Persamaan 2	96
16.	Hasil Uji Chow-Test Untuk Persamaan 3	102
17.	Hasil Uji Hausman Test Untuk Persamaan 3	103
18.	Hasil Estimasi Regresi Panel Persamaan 3	104

DAFTAR GAMBAR

Hal

1. Perpotongan Teori Keynesian	21
2. Kerangka Konseptual Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Efektifitas PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat.....	51
3. Kerangka Konseptual Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Efektifitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat.....	52
4. Kerangka Konseptual Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Data Pertumbuhan Ekonomi, Alokasi Belanja Modal, Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan , Dan Efektifitas PAD Di Sumatera Barat	128
2. Hasil Olahan Data Chow Persamaan 1	131
3. Hasil Olahan Data Chow Persamaan 2	132
4. Hasil Olahan Data Hausman Persamaan 3	133
5. Tabel T	134
6. Tabel F	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang di alami dunia semenjak dua abad belakangan ini. Sama halnya dengan Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang optimal dan pembangunan yang terpadu sangat di perlukan untuk mengembangkan perekonomian di setiap daerah regional yang ada. Hal tersebut diperlukan karena Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan daerah regional dalam jumlah yang banyak, dimana setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Berbagai perbedaan antar daerah regional merupakan konsekuensi dari berbagai variasi yang meliputi kondisi perekonomian, distribusi sumber daya alam serta atribut sosial masyarakat (Karmaji, 2007).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang kunci keberhasilan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi daerah tujuannya untuk menumbuhkan perekonomian daerahnya melalui peningkatan pendapatan daerah. Sularso dan Restianto (2011) menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kemandirian daerah yang ditunjukkan oleh kenaikan produk

domestik regional bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat beberapa tahun terakhir melambat tetapi bila dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tetap terbaik yaitu rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 3 tertinggi diantara 10 provinsi di Pulau Sumatera. Berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera
Tahun 2012-2016 (%)

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
Aceh	3,85	2,61	1,55	-0,37	03,31	1,56
Sumatera Utara	6,45	6,07	5,23	5,1	3,31	5,23
Sumatera Barat	6,31	6,08	5,88	5,52	5,26	5,81
Riau	3,76	2,48	2,71	0,22	2,33	2,3
Jambi	7,03	6,84	7,36	4,2	4,37	5,96
Sumatera Selatan	6,83	5,31	4,79	4,42	5,03	5,27
Bengkulu	6,83	6,07	5,48	5,13	5,3	5,76
Lampung	6,44	5,77	5,08	5,13	5,15	5,51
Kepulauan Bangka Belitung	5,5	5,2	4,67	4,08	4,11	4,71
Kepulauan Riau	7,63	7,21	6,6	6,01	5,03	6,49
Indonesia	6,16	5,71	5,21	4,99	5,16	4,86

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), 2012-2016

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi menurut provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012-2016. Rata –rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di provinsi Kepulauan Riau dimana rata-rata dalam kurun 5 tahun terakhir adalah sebesar 6,49 persen. Selanjutnya rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kedua diikuti oleh provinsi Jambi sebesar 5,96 persen dan yang ketiga Sumatera Barat sebesar 5,81 persen. Sedangkan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah provinsi aceh yaitu sebesar 1,56 persen.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dalam 5 tahun terakhir akan tetapi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat disebabkan oleh masih terbatasnya realisasi karena serta faktor infrastruktur yang belum memadai menjadi penyebab tertahannya kinerja investasi dan perekonomian global yang sedang lesu karena ada pilkada dan transisi masa pemerintahan (finansial.bisnis.com). Walaupun Sumatera Barat telah gencar dalam mengembangkan sektor pariwisata untuk menumbuhakna potensi ekonomi batru akan tetapi teradi permasalahan pada minat investor untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai wujud untuk memacu pertumbuhan ekonomi belum maksimal hal ini karena terhambat oleh ketersediaan lahan untuk mengebangkan sektor pariwisata karena susah menembus pemangku adat untuk lahan pengembangan sektor pariwisata (ekonomi.kompas.com). Sehingga saat ini fokus pemerintah adalah upaya untuk menekan inflasi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Terjaganya daya beli diharapkan bisa mendorong konsumsi rumah tangga bisa tumbuh sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bisa ikut terjaga.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat disebabkan berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah pengelolaan keuangan pada pemerintahan yang berjalan dengan baik. Tata kelola yang baik (*good governance*) iniakan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah Daerah diharuskan mengelola keuangan secara ekonomis, efisien dan efektif. Hal ini dipertegas Suwandi et, al. (2015) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan oleh pemerintah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan

keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal maka diharapkan setiap daerah mampu menggali potensi daerah yang mampu menunjang perekonomian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Besarnya PAD yang di peroleh oleh suatu daerah juga menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, akan tetapi ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah masih dirasakan kurang terlihat dari kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang masih kecil hal ini tentunya belum mampu menunjang perekonomian daerah.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Arsa, 2015). Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah

dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah termasuk pada provinsi Sumatera Barat, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997 ; A Halim , 2001)

Tabel 1.2
Kinerja Keuangan Daerah dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabuapten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun
2014- 2016 (%)

Kab / Kota	Kinerja Keuangan Daerah									Pertumbuhan Ekonomi		
	Derajat Dsesentralisasi Fiskal			Ketergantunga Keuangan			Efekifitas PAD					
Kabupaten	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Kep.mentawai	4,87	5,16	5,75	91,44	81,73	87,46	95,72	100,00	100,00	5,58	5,19	5,01
Pesisir selatan	7,38	7,84	5,51	75,41	67,62	82,79	83,88	89,47	100,00	5,80	5,73	5,30
Solok	5,21	5,05	4,12	77,18	72,90	88,67	105,80	114,95	100,00	5,79	5,43	5,30
Sijunjung	7,25	7,85	6,73	80,22	74,64	85,28	120,70	115,90	100,00	6,02	5,66	5,25
Tanah Datar	9,92	9,73	9,03	72,49	66,55	84,00	108,69	121,45	100,00	5,78	5,31	5,01
Padang Pariaman	5,89	6,11	5,33	75,41	72,48	72,58	102,43	107,07	98,08	6,05	6,13	5,50
Agam	7,02	7,07	6,74	73,55	69,73	85,83	107,56	111,37	82,65	5,91	5,51	5,40
Limo Puluh Kota	5,26	5,53	5,78	77,75	72,48	72,23	113,38	103,57	90,54	5,97	5,56	5,31
Pasaman	8,96	8,96	6,41	75,03	73,13	84,02	105,50	98,43	98,49	5,87	5,33	5,06
Solok Selatan	5,13	5,21	4,76	80,87	77,07	80,68	127,40	120,62	87,56	5,90	5,35	5,11
Darmasraya	7,68	7,14	7,48	79,12	76,10	83,98	100,00	119,20	144,72	6,33	5,80	5,39
Pasaman Barat	7,94	7,16	6,99	77,55	76,21	75,05	185,07	85,31	100,00	6,03	5,70	5,32
Rata-Rata Kabupaten	6,88	6,90	6,22	78,00	73,39	81,88	113,01	107,28	100,17	5,92	5,56	5,52
Padang	16,50	19,02	21,57	61,79	60,03	71,77	102,71	92,13	99,73	6,57	6,35	6,21
Solok	6,03	6,98	7,33	81,78	79,25	90,85	107,41	129,62	97,50	6,00	5,95	5,75
Sawahlunto	9,95	9,72	9,32	78,91	77,78	86,32	111,23	98,67	90,44	6,01	6,00	5,71
Padang panjang	10,86	13,27	10,69	79,69	75,46	86,63	110,44	126,32	91,31	6,07	5,91	5,79
Bukitinggi	10,35	11,13	12,34	76,03	75,82	82,89	106,50	105,37	118,71	6,18	6,12	6,04
Payakumbuh	10,92	14,30	12,66	76,04	72,26	84,51	100,29	119,75	109,39	6,47	6,19	6,08
Pariaman	4,83	5,21	4,65	79,89	79,09	92,44	129,59	108,91	94,07	5,99	5,78	5,58
Rata-Rata Kota	9,92	11,38	11,22	76,30	74,24	85,06	85,06	111,54	100,16	6,18	6,04	5,88

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Kab/Kota Sumatera Barat, 2014-2016

Pada tabel 1.2 dapat kita lihat dari secara keseluruhan segi keuangan daerah belum mengalami perbaikan yang signifikan baik dari segi PAD berupa derajat desentralisasi fiskal, efektifitas PAD maupun segi dana perimbangan. Tabel 1.2 di atas memperlihatkan bahwa secara rata-rata kinerja keuangan daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, indikator kinerja keuangan daerah dari segi derajat desentralisasi fiskal dimana PAD terhadap total pendapatan daerah bahwa rata-rata laju pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi dari pada pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal kabupaten. Namun jika di lihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonominya, kota juga memperoleh rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pula dibandingkan kabupaten.

Namun demikian, apabila dilihat dari rata-rata PAD dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten dari tahun 2014 sampai dengan 2016, terlihat bahwa pada tahun 2014 sampai 2015 rata-rata derajat desentralisasi fiskal mengalami peningkatan sementara laju pertumbuhan ekonominya justru malah mengalami penurunan. Sedangkan, apabila dilihat dari kota, pada tahun 2014 ke 2015 pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal kota mengalami peningkatan sementara laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

Secara keseluruhan baik kabupaten maupun kota belum memperlihatkan efektifitas dalam menggunakan pendapatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sesuai *Keynesian Theory*, dimana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa ketika pendapatan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. fenomena yang terjadi di kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan.

Sedangkan dari sisi ketergantungan keuangan daerah rata-rata pertumbuhan dana transfer kabupaten dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan dari 78,00 ke 73,39 dan tahun 2016 mengalami peningkatan lagi sebesar 81,88. Jika dilihat dari wilayah kota dan kabupaten diperoleh rata-rata dana transfer jumlahnya yang cukup besar sedangkan laju pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan. Seharusnya semakin besar daerah yang memiliki dana transfer dari pusat yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh juga akan tinggi pula. Akan tetapi dengan besarnya proporsi dana transfer terhadap pendapatan daerah justru pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kenaikan. Adanya permasalahan ini, menandai bahwa harapan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah belum memberikan hasil yang diharapkan.

Begitu juga dari segi efektifitas PAD dimana efektifitas PAD wilayah kabupaten dan kota di atas rata-rata 100% bahwa dikategorikan sangat efektif artinya bahwa pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD nya sangat tinggi dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Hal ini hendaknya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan. Bahwa dapat kita simpulkan indikator kinerja keuangan yang membaik tidak memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi, seharusnya kinerja keuangan daerah yang membaik akan menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Penelitian Adi (2005) menggunakan pertumbuhan ekonomi daerah memasuki era otonomi untuk membedakan tingkat kesiapan daerah, hasilnya bahwa

kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian Kaliti (2011) tentang Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, penelitiannya menunjukkan bahwa menunjukkan rasio efektivitas PAD dan kemandirian daerah tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Aktivitas pembangunan dan pemerintahan di daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan fiskal yang besar di era desentralisasi sangat menentukan struktur anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah (APBD). Dari substansi pemerintah dapat dilihat upaya keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, seberapa besar penerimaan yang harus digali, ke arah mana belanja pemerintah difokuskan. Perilaku pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan berpengaruh dalam proses penganggaran daerah. Struktur anggaran mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah dalam pembangunan daerah terutama jika dilihat dari porsi belanja modal. Jika kinerja keuangan yang baik akan berpengaruh pada struktur anggaran yang condong pada pembanguna daerah.

Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Masalah pengalokasian ini terutama terkait dengan sumber daya.. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan pendapatan daerahnya yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Hidayat, 2013). Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan. Baik atau tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari Kinerja keuangan pemerintah daerah

yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah, jika pemerintah daerah dalam menggunakan sumber pendapatan daerah lebih banyak untuk belanja modal pelayanan publik. Karena belanja modal pelayanan publik bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, namun pada prakteknya pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal karena masalah keagenan dalam penyusunan anggaran daerah.

Pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran belanja proyek pembangunan atau belanja modal merupakan proses yang erat dengan kepentingan politis. Anggaran dalam APBD sebenarnya dimaksud untuk kebutuhan publik akan saran dan prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya adanya kepentingan politik yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif (Keefe dan Khemani,2003)

Tabel 1.3
Kinerja Keuangan Daerah dan Alokasi Belanja Modal Kabuapten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 (%)

Kab / Kota	kinerja Keuangan Daerah									Alokasi Belanja Modal		
	Derajat Dsesentralisasi Fiskal			Ketergantunga Keuangan Daerah			Efekifitas PAD					
Kabupaten	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Kep.mentawai	4,87	5,16	5,75	91,44	81,73	87,46	95,72	100,00	100,00	27,17	29,93	30,88
Pesisir selatan	7,38	7,84	5,51	75,41	67,62	82,79	83,88	89,47	100,00	18,77	20,38	20,54
Solok	5,21	5,05	4,12	77,18	72,90	88,67	105,80	114,95	100,00	18,54	17,04	17,58
Sijunjung	7,25	7,85	6,73	80,22	74,64	85,28	120,70	115,90	100,00	20,41	20,98	25,43
Tanah Datar	9,92	9,73	9,03	72,49	66,55	84,00	108,69	121,45	100,00	12,67	12,39	15,38
Padang Pariaman	5,89	6,11	5,33	75,41	72,48	72,58	102,43	107,07	98,08	19,34	18,02	20,31
Agam	7,02	7,07	6,74	73,55	69,73	85,83	107,56	111,37	82,65	13,97	12,92	14,08
Limo Puluh Kota	5,26	5,53	5,78	77,75	72,48	72,23	113,38	103,57	90,54	19,40	16,00	20,24
Pasaman	8,96	8,96	6,41	75,03	73,13	84,02	105,50	98,43	98,49	20,58	20,65	25,32
Solok Selatan	5,13	5,21	4,76	80,87	77,07	80,68	127,40	120,62	87,56	30,83	30,63	31,04
Darmasraya	7,68	7,14	7,48	79,12	76,10	83,98	100,00	119,20	144,72	26,95	33,05	29,64
Pasaman Barat	7,94	7,16	6,99	77,55	76,21	75,05	185,07	85,31	100,00	23,11	21,25	26,04
Rata-Rata Kabupaten	6,88	6,90	6,22	78,00	73,39	81,88	113,01	107,28	100,17	20,98	21,10	23,04
Padang	16,50	19,02	21,57	61,79	60,03	71,77	102,71	92,13	99,73	15,21	14,76	21,96
Solok	6,03	6,98	7,33	81,78	79,25	90,85	107,41	129,62	97,50	18,50	20,15	25,66
Sawahlunto	9,95	9,72	9,32	78,91	77,78	86,32	111,23	98,67	90,44	18,65	24,63	27,77
Padang panjang	10,86	13,27	10,69	79,69	75,46	86,63	110,44	126,32	91,31	15,91	22,62	38,86
Bukitiinggi	10,35	11,13	12,34	76,03	75,82	82,89	106,50	105,37	118,71	14,12	11,95	11,33
Payakumbuh	10,92	14,30	12,66	76,04	72,26	84,51	100,29	119,75	109,39	17,73	23,72	22,73
Pariaman	4,83	5,21	4,65	79,89	79,09	92,44	129,59	108,91	94,07	25,21	29,35	29,28
Rata-Rata Kota	9,92	11,38	11,22	76,30	74,24	85,06	85,06	111,54	100,16	17,90	21,03	25,37

Sumber:Statistik Keuangan Daerah Kab/Kota Sumatera Barat,2014-2016

Pada tabel 1.3 dari segi derajat desentralisasi fiskal dimana rata-rata derajat desentralisasi fiskal yang ditunjukkan PAD terhadap total pendapatan daerah dimana bahwa wilayah kabupaten memiliki derajat desentralisasi fiskal rendah akan tetapi alokasi belanja modal kabupen besar, sedangkan pada wilayah kota rata-rata PAD terhadap total pendapatan daerah tinggi akan tetapi alokasi belanja modal kota rendah dibandingkan kabupaten. Hal ini menunjukkan fenomena dimana dengan PAD terhadap total pendapatan daerah tinggi malah menyebabkan alokasi belanja modal tidak naik juga seiring meningkatnya PAD. Karena dalam rangka melaksanakan kewenangan fiskal dengan meningkatnya PAD maka pengalokasian belanja modal juga naik (Mardiasmo, 2009:73). Dari ketergantungan keuangan daerah menduduki porsi yang lebih besar daripada PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar bisa menjadi daerah yang mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat atau pihak eksternal. Oleh karena itu setiap daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan cara lebih menggali sumber daya yang dimiliki daerah.

Dari segi kinerja PAD yaitu dengan melihat perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan, apabila realisasi penerimaan PAD lebih besar daripada anggaran oleh pemerintah daerah maka dapat dikatakan kinerja dalam segi PAD dapat dikatakan efektif. PAD merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi dari suatu daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh maka dapat mengurangi ketergantungan suatu daerah terhadap Pemerintah Pusat. Akan tetapi, faktanya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran aparatur masih jauh lebih besar daripada anggaran untuk rakyat misalnya anggaran belanja modal, anggarannya lebih kecil

daripada belanja pegawai di antaranya yaitu anggaran untuk belanja pegawai yang lebih besar. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Akan tetapi pengalokasian belanja modal dari rata-rata 4 tahun terakhir hanya tumbuh rata-rata paling besar sebesar 24% dari total pengeluaran pemerintah, artinya pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah masih belum optimal karena mungkin pengeluaran lainnya lebih besar pada belanja pegawai. Seharusnya belanja modal lebih besar daripada belanja lainnya sehingga infrastruktur akan berkualitas dan investasi akan tumbuh dengan tersedianya infrastruktur yang memadai untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang baik.

Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) yang meneliti tentang Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan publik menyatakan hasilnya di mana kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Havid Sularso dan Yanuar E. Restianto (2011) yang menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kinerja keuangan, khususnya rasio ketergantungan keuangan, kemandirian daerah namun untuk rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Menurut Kuncoro(2004) pertumbuhan ekonomi akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan

kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring atau diikuti dengan adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur dan juga dinilai dari kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Ketika sektor-sektor produktif tersebut memberikan dampak yang positif (manfaat) terhadap pembangunan suatu daerah, maka secara otomatis seharusnya pemerintah daerah meningkatkan jumlah (porsi) belanja modal. Akan tetapi Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan belanja modal ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % seperti dapat dilihat tabel 1.4

Tabel 1.4
Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2016(%)

	Alokasi Belanja Modal			Pertumbuhan Ekonomi		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Kabupaten						
Kep.mentawai	27,17	29,93	30,88	5,58	5,19	5,01
Pesisir selatan	18,77	20,38	20,54	5,80	5,73	5,30
Solok	18,54	17,04	17,58	5,79	5,43	5,30
Sijunjung	20,41	20,98	25,43	6,02	5,66	5,25
Tanah Datar	12,67	12,39	15,38	5,78	5,31	5,01
Padang Pariaman	19,34	18,02	20,31	6,05	6,13	5,50
Agam	13,97	12,92	14,08	5,91	5,51	5,40
Limo Puluh Kota	19,40	16,00	20,24	5,97	5,56	5,31
Pasaman	20,58	20,65	25,32	5,87	5,33	5,06
Solok Selatan	30,83	30,63	31,04	5,90	5,35	5,11
Darmasraya	26,95	33,05	29,64	6,33	5,8	5,39
Pasaman Barat	23,11	21,25	26,04	6,03	5,70	5,32
Kota						
Padang	15,21	14,76	21,96	6,57	6,35	6,21
Solok	18,50	20,15	25,66	6,00	5,95	5,75
Sawahlunto	18,65	24,63	27,77	6,01	6,00	5,71
Padang panjang	15,91	22,62	38,86	6,07	5,91	5,79
Bukitiinggi	14,12	11,95	11,33	6,18	6,12	6,04
Payakumbuh	17,73	23,72	22,73	6,47	6,19	6,08
Pariaman	25,21	29,35	29,28	5,99	5,78	5,58
rata-rata	19,85	21,07	23,90	6,02	5,74	5,48

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tabel 1.4 dapat kita lihat bahwa alokasi belanja modal pada kabupaten/kota Sumatera Barat pada 3 tahun terakhir terus berfluktuasi cenderung mengalami peningkatan, tetapi yang terjadi laju pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan rendahnya porsi belanja modal di Sumatera Barat sehingga menyebabkan minimnya investasi di Sumatera Barat ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya pembentukan modal di Sumatera Barat yang nantinya akan berujung pada rendahnya laju pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan penelitian penelitian Anasmen (2009) tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi hasilnya menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah kota/kabupaten tidak berpengaruh cukup besar pada pertumbuhan PDRB . Hasil penelitian Anasmen ini didukung oleh Setiyawati (2007) yang menyatakan bahwa belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian oleh Parnawati (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal yang menghasilkan kesimpulan bahwa peningkatan belanja modal dapat meningkatkan PDRB tetapi peningkatan PDRB tidak mempengaruhi peningkatan belanja modal.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula. Kinerja keuangan akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alokasi belanja modal yang memadai akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja keuangan yang baik juga diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif alat untuk memprediksi kontribusi anggaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara empiris belum

banyak bukti yang mengkaitkan langsung antara kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Seauhmana pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal?
2. Seauhmana pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Seauhmana pengaruh alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Seauhmana pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal ?
5. Seauhmana pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

C. Tujuan penelitian

1. Menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD terhadap alokasi belanja modal

2. Menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Menganalisis pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi
4. Menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal
5. Menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, efektifitas PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, diantaranya :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi publik yang khususnya membahas masalah yang berkaitan.
3. Bagi pemerintah daerah, untuk membantu sebagai bahan perbandingan dan masukan untuk membuat kebijakan terkait.
4. Bagi penelitian selanjutnya, yakni sebagai referensi dalam mengkaji masalah yang berkaitan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1985) dalam (Kuncoro,2004:129) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, haikitkat, dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritikus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan, rasa aman, dan tentram yang dirasakan masyarakat luas Arsyad 1999(dalam Kuncoro 2004:129).

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Perkembangan kegiatan perekonomian menunjukkan adanya pertambahan kesibukan masyarakat terkait dalam perekonomian. Suatu wilayah yang memiliki tingkat kegiatan perekonomian yang tinggi akan terlihat lebih maju dan makmur dibandingkan dengan kegiatan perekonomian yang rendah. Hal ini disebabkan perputaran dana dalam wilayah tersebut lebih cepat dan otomatis penyediaan dan pelayanan publik akan semakin meningkat (Sukirno,2006:9).

Prof. Simon Kuznet, mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan (Jhingan, 2000:57). Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satu tahun dapat menggunakan rumus sebagaimana yang dijelaskan dalam Sukirno (2000:56) sebagai berikut:

$$Gt = \frac{Yr_t - Yr_{t-1}}{Yr_{t-1}} \times 100 \dots \dots \dots (2.1)$$

Keterangan:

gt = tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t (persen)

Yrt = pendapatan nasional (PDRB) riil pada tahun t (Rupiah)

Yrt-1 = pendapatan nasional (PDRB) pada tahun sebelumnya (Rupiah)

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomin adalah terjadinya kenaikan dalam jumlah output yang diukur dalam jumlah PDB/PDRB atau pendapatan daerah pada periode tertentu

Menurut Jhingan (2000), penentu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa adalah sebagai berikut.

- a. Akumulasi modal, Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu dapat dikatakan sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang

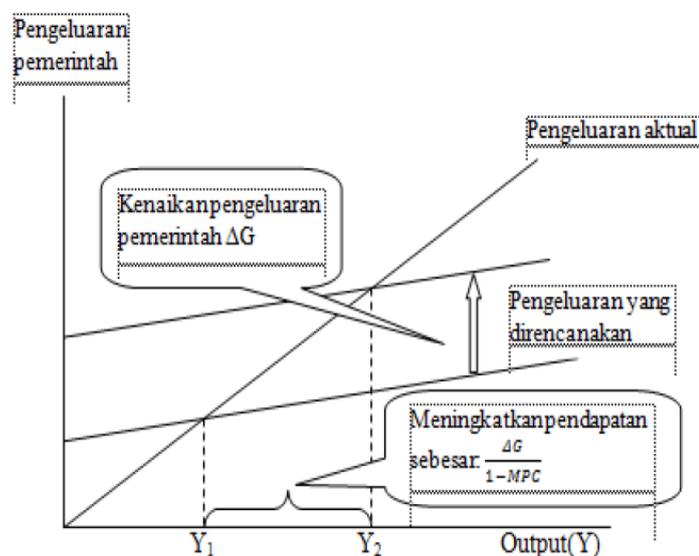
ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia;

- b. Pertumbuhan penduduk, yang akan meningkatkan jumlah angkatan kerja;
- c. Kemajuan teknologi, Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

Ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanian dan industri. Jika output di kedua sektor tersebut ditingkatkan maka PNB potensialnya akan bisa ditingkatkan pula. Ada dua kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor-faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi. Dan faktor-faktor non ekonomi seperti keamanan atas kekayaan konstitusi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi. Diantara faktor ekonomi tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor akumulasi modal. Tanpa penambahan modal proses produksi akan berhenti dan berarti PNB potensial akan berkurang atau hilang. Sumber utama dari akumulasi modal adalah keuntungan dari perusahaan, bukan penghematan konsumsi atau tabungan masyarakat (Tambunan, 2011:44).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Mankiw (2007: 284), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan seluruh output yang dihasilkan oleh masyarakat didalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, Teori Keynesian menyatakan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ini diilustrasikan dengan pemodelan yang disebut perpotongan Keynesian, seperti yang digambarkan di bawah ini:



Gambar 1 : perpotongan keynesia

Kenaikan pengeluaran/ belanja pemerintah sebesar ΔG akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu, maka akan meningkatkan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi naik dari Y₁ ke Y₂. Jika kita memasukkan unsur daerah dalam teori keynesian ini, maka dapat di maknai bahwa pada saat pendapatan suatu daerah meningkat baik dari PAD maupun dana perimbangan, secara otomatis pengeluaran saat itu juga meningkat sehingga dengan meningkatnya pengeluaran maka pertumbuhan akan meningkat pula.

Karena fungsi dari pendapatan yaitu untuk membelanjai kegiatan pembangunan suatu daerah.

Keynes dalam (Todaro, 2006) berpendapat bahwa tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh pembelanjaan agregat. Pada umumnya pembelanjaan agregat dalam suatu periode tertentu adalah kurang dari pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat full employment. Keynes berpendapat sistem pasar bebas tidak akan dapat membuat penyesuaian yang akan menciptakan full employment. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah salah satunya adalah kebijakan fiskal, kebijakan fiskal melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang nantinya akan menunjang dalam perekonomian suatu daerah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Halim (2004:123) yang menyatakan bahwa salah satu fungsi sektor publik ialah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal artinya sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong adalah salah satu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi

dan manfaat pendapatan dan belanja daerah bagi tercapainya sasaran atas agenda pembangunan daerah.

Hal ini didukung oleh teori Tiebout dalam (Sumarsono Dan Hadi Utomo,2009) yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Kondisi peningkatan pelayanan barang publik ini dalam kaitannya hubungan antar daerah otonom akan memberikan kondisi kompetisi persaingan antar kabupaten/kota untuk memaksimalkan kepuasan bagi masyarakat. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan, sekaligus dari sisi penganggaran publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan berdaya guna. Dari teori Tiebout tersebut dapat dimaknai bahwa lahirnya desentralisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga berujung pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara agregat

Salah satu strategi utama pembangunan yang diperlukan untuk lepas landas adalah mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri untuk menghasilkan investasi yang cukup guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Mekanisme ekonomi dimana investasi yang lebih banyak akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dapat diuraikan dengan menggunakan model pertumbuhan Harrod-Domar. Model pertumbuhan Harrod-Domar ini menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan produk domestik bruto bergantung langsung pada

tingkat tabungan neto, dan berbanding terbalik dengan rasio modal output nasional (Todaro,2011:136).

3. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Sehubungan dengan itu Pamudji dalam Kaho (2005:138) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan suatu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, akuntabilitas publik merupakan kata kunci. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*publik money*) yang mendasar konsep *value for money*, maka diperlukannya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja. Hal tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi (Mardiasmo 2002,103). Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah (Halim,2004:24). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini digunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD.

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing daerah.

Hakekat otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemeritahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan keuanagan sangat dibutuhkan agar perenaan perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Halim,2004:22). Tujuan utama penyelenggraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: *pertama*, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. Dan *ketiga* menciptakan ruang bagi masyarakat dalam proses pembangunan (Mardiasmo,2002:59).

Setelah digulirkannya era desentralisasi ini setiap daerah berpacu dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya .Dalam hal ini salah satu faktor yang dapat mendorong semakin baiknya pertumbuhan ekonomi adalah tingginya kemampuan keuangan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah dilihat dari

PAD daerah tersebut. Untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Salah satu ukuran kinerja ialah derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal adalah perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah atau dana bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerah. Dalam penelitian ini digunakan PAD dengan total pendapatan daerah karena PAD merupakan pendapatan daerah yang harus terus ditingkatkan dengan menggali potensi yang ada pada daerah tersebut.

Menurut E.Koswara,2000 dalam (Halim 2004:35) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai syarat mendasar sistem pemerintahan negara. Salah satu kinerja keuangannya adalah desentralisasi fiskal dalam PAD adalah salah satu faktor yang mendukung perekonomian suatu daerah. Mengingat prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bentuk dari desentralisasi yang ketiga (*devolution*). Lebih lanjut Slinko (2002) menyatakan bahwa:

Under the concept of "fiscal decentralization" we understand the assignment of fiscal responsibilities to the lower levels of government, that is, the degree of regional (local) autonomy and the authority of local government to decide upon its own expenditure and its ability to generate local revenues.

Pernyataan Slinko mempertegas pengertian desentralisasi fiskal, yaitu sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pemberian otoritas bagi pemerintah daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

b. Ketergantungan Keuangan Daerah

Dana perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Sidik 2000 dalam (Halim, 2004:35). Hal ini subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri. Ada 3 fungsi pemerintah dalam pembangunan R.A Musgrave (1993:6-7) yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan alokasi, fungsi tersebut harus mendukung dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga meningkatkan kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu, lahirnya undang-undang otonomi daerah meruokan perwujudan dari peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi, yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan dalam rangka untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk distribusi tersebut, diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang diberikan kepada daerah dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan

daerah dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 dan 25 1999 serta peraturan pemerintahan Nomor 104 Tahun 2000, tentang dana perimbangan dijelaskan bahwa salah satu penerimaan daerah berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pembangunan daerah.

Dari beberapa penjelasan maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antar daerah sehingga setiap daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan dana transfer dari pusat sebagai pendapatan daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Kebijakan perimbangan keuangan atau ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

- 1) Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;

- 2) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
- 4) Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

c. Efektifitas PAD

Salah satu sumber pendapatan daerah dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kemampuan daerah untuk menerapkan sistem desentralisasi adalah ketika daerah tersebut memperoleh PAD sesuai target yang dianggarkan. Untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui penerimaan PAD diharapkan dapat disalurkan pada investasi dan pemeliharaan infrastruktur daerah.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin baik (Halim, 2004;285). Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Budiarto, 2007 dalam Sularso dan Restianto, 2011).

Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Brata (2004) yang dikutip oleh Adi dan Harianto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Belanja Modal

Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu perekonomian di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Harianto dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Sejalan dengan pendapat Tambunan (2011) pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka dari penjelsan diatas dapat kita sederhanakan menjadi:

$$PT = F (DF, KK ,EFEKTIF PAD, BM)$$

Ket:

ABM= alokasi belanja modal

PT= Pertumbuhan Ekonomi

DF= Derajat Desentralisasi Fiskal

KK= Ketergantungan Keuangan Daerah

4. Peranan Pemerintah Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah adalah penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama, tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksirkan potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Menurut Abelson (2002:65) tindakan atau dampak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut.

a. Penyediaan infrastruktur yang aman adalah merupakan barang publik murni.

Peran keuangan sangat penting untuk mobilisasi tabungan dan penyebaran efisien sumber daya modal untuk penyediaan infrastruktur . pertumbuhan Ekonomi memerlukan sistem keuangan nasional dan pengawasan prudential yang akan menjamin keamanan dan kesehatan intitusi keuangan, sementara juga memungkinkan untuk berkompetisi .

b. Investasi dalam infrastruktur ekonomi

Keterlibatan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur ekonomi, seperti energi dan air, trasport dan fasilitas komunikasi, hal ini karena ada dua alasan utama. Pertama, karena pelayanan sering monopoli alami karena perusahaan swasta dapat menekan harga .Kedua, pelayanan infrastruktur memberikan manfaat eksternal yang tidak dapat ditangkap oleh perusahaan swasta. Hal ini juga sependapat bahwa penyediaan infrastruktur publik sangat berkorelasi dengan pertumbuhan produktifitas swasta di banyak negara, dan bahwa ini memerlukan tindakan pemerintah (Thurow, 1996).

c. Investasi dalam pendidikan

Manfaat publik yang dirasakan masyarakat adalah melalui pendidikan umumnya melebihi manfaat pribadi.Perbandingan Internasional juga mendukung kasus untuk investasi publik dalam pendidikan. Tingkat ralative pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara Asia timur dibandingkan dengan asia selatan, timur tengah dan Afrika, di sering dikaitkan dengan kuantitas dan kualitas pendidikan di asia timur.

d. Pengeluaran konsumsi oleh pemerintah

Menurut (Sach Dan Warner,1995) bahwa pengeluaran konsumsi untuk publik dilakukan melalui investasi publik untuk memacu pertumbuhan ekonomi

Di dalam melakukan pembangunan diperlukannya pengeluaran pemerintah untuk mendukung berjalannya pembnaguanan ekonmi. Menurut Bailey (2001:47) Kategori pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut.

a. Pengeluaran lengkap

pengeluaran lengkap ini mengacu pada pembelian pemerintah terhadap mengkonsumsi atau daya beli uang , maka “pengeluaran lengkap. Dan hal itu termasuk pembelian input (tenaga kerja) yang digunakan baik dalam produksi maupun jasa dan pembelian output dari sektor swasta. Dan juga termasuk investasi dalam aktiva tetap seperti mesin, tanah dan bangunan. Sederhananya, pengeluaran lengkap menggunakan sumber daya yang produktif.

b. Pembayaran transfer / belanja

Ini mengacu pada pengeluaran di mana pemerintah tidak membeli faktor-faktor produksi atau penggunaan sumber daya. Sebaliknya uang trasfer dari pembayar pajak termasuk subsidi untuk perusahaan sektor swasta., Pembayaran bunga, pinjaman yang diberikan oleh pemerintah dan bantuan luar negeri. Komponen terbesar dari pembayaran trasfer adalah tunjangan kesejahteraan seperti dukungan pendapatan, tunjangan pengangguran dan negara pensiun, pertumbuhan yang telah pemelihara substaintial pada tahun 1960.

Peran pemerintah dalam sisi Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yang tercermin dari dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaa dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Kebijakan fiskal pada tingkat wilayah dapat dilakukan dalam bidang pengarturan dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Alasannya adalah karena perubahan penerimaan dan belanja daerah akan langsung mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Penerimaan daerah dapat berbentuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat diperoleh dari pajak dan retribusi daerah. Sedangkan belanja daerah dapat berbentuk biaya aparatur, belanja publik, dan belanja modal sebagaimana terlihat pada *anggran pendapatan dan belanja daerah* (APBD) daerah .

Jadi bahwa kebijakan fiskal daerah menyangkut dengan pengeluaran (belanja) yang dapat dilakukan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah adalah dalam bentuk peningkatan proporsi dana APBD yang dialokasikan untuk pengeluaran yang produktif. Kebijakan ini penting artinya karena kenyataan dilapangan menunjukan bahwa proporsi dana yang digunakan untuk belanja

pegawai ternyata makin lama makin besar, bahkan belanja modal untuk pelayanan publik itu sendiri hanya direalisasikan kecil

5. Alokasi Belanja Modal

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006). Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Straub (2008) menjelaskan bahwa teori pertumbuhan modern menekankan kemungkinan peran belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya efek langsung peningkatan Belanja modal adalah dapat secara langsung mempengaruhi produktivitas faktor-faktor lain yang dapat merangsang peningkatan output ekonomi.

Hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Mardiasmo,2004:22).

Menurut Key (1940, p.1144) pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik karena keterbatasan sumber daya. Key mengusulkan bahwa solusi atas permasalahan tersebut bisa ditemukan melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan kelembagaan di mana keputusan alokasi sumber daya dibuat, yang akan dimulai melalui analisis yang cermat dan komprehensif dari proses penganggaran (Fozzard, 2001). Terlepas dari pengaturan kelembagaan tersebut, pengalokasian sumberdaya ke dalam anggaran belanja proyek pembangunan atau belanja modal (*capital expenditure*) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan- kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Ukuran kinerja yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya (belanja modal) salah satu nya adalah kinerja keuangan (Reck, 2001). Di sektor publik sifat kinerja keuangan adalah fungsi dari entitas sektor publik yang bertanggung jawab untuk mencapai aspek keuangan pada periode yang diidentifikasi (Conceptual Framework Task Force, 2012). Kinerja keuangan daerah dapat diproksikan oleh berbagai indikator seperti rasio derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, dan efektivitas PAD. Rasio-rasio keuangan tersebut merupakan rasio yang relevan

yang dapat digunakan di sektor publik, sementara yang lain kurang relevan. Hal ini karena karena sektor publik bukanlah organisasi yang tujuan mencari laba.

Otonomi daerah dan desentralisasi yang efektif berlaku sejak tahun 2001 merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Konsekuensinya adalah pelimpahan wewenang yang diikuti alokasi anggaran dan penyediaan barang publik pada pemerintah daerah. Halim (2004:22), menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah

PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adanya kata “ asli” dimaksudkan bahwa pendapatan tersebut benar-benar berasal dari sumber asli daerah, dengan kata lain bukan merupakan pemberian bantuan, hibah, penyertaan modal dan sebagainya. Akan tetapi menurut Mardiasmo sampai saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah

daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain Mardiasmo,2002:146 dalam (Halim, 200:128) :

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiskal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal GAP*.
- 2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kemasayarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi).

Dengan berbagai masalah yang dikemukakan di atas maka diharapkan pemda dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan pemda untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil yang dimiliki oleh daerah. Untuk itu diperlukan metode perhitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional (Halim,2004:128). PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (pemerintah pusat). Pada dasarnya pendapatan asli daerah ditunjang oleh hasil – hasil dari perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan

kebersihan, pajak bumi dan bangunanserta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi yang di drop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Pembangunan daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan tersebut juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer terhadap pusat (Kuncoro, 2004:14).

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, dana perimbangan masih memegang peran yang besar. Menurut Sriyana 1999 dalam (Halim,2004:128) porsi PAD masih kurang sedangkan bantuan pemerintah pusat mencapai 70% dari total APBD. Angka-angka ini terlihat bahwa sistem keuangan daerah sangat terpusat, sehingga kondisi keuangan daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat. Lebih lanjut Adullah (2004:47) dalam (Halim,2004:129) menyatakan bahwa rendahnya PAD bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber keuangan potensial, tetapi disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber keuangan potensial dikuasai oleh pemerintah pusat, diharapkan di masa

yang akan datang peran PAD dapat menggeser peran dana perimbangan, sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat berkurang.

Sarug dan Sagbas (2008) menemukan bahwa dana transfer dari pemerintah (intergovernmental transfer) dapat menjadi substitusi ataupun dapat menjadi stimulus dalam belanja daerah. Apabila efek substitusi ditemukan maka pemerintah daerah akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang mereka terima yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya apabila efek stimulus yang ditemukan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya pajak daerahnya. Ternyata daerah otonom tidak mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya sehingga pemerintah masih memerlukan bantuan keuangan dari pusat. Besarnya nilai transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, seharusnya menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan fungsinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan adanya desentralisasi fiskal (Rusydi, 2010 dalam Utomo, 2012). Namun kenyataan yang terjadi adalah dana transfer dijadikan sumber utama penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Kondisi ini ditunjukkan dengan nilai PAD yang mampu dikumpulkan daerah tidak sebanding dengan besarnya dana perimbangan yang diterima daerah. Hal ini diindikasikan sebagai *ilusi fiskal* dimana peningkatan PAD yang tidak seimbang dengan peningkatan dana perimbangan terhadap belanja, sehingga belanja didominasi oleh dana perimbangan (Rusydi, 2010).

Oleh karena itu daerah otonom cenderung lebih mengandalkan kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan pinjaman daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Halim,2004:36). Terdapat hubungan yang kuat antara dana transfer dari pusat dengan belanja modal. Semakin tinggi dana transfer dari pusat terhadap total pendapatan daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang dibelanjakan. Menurut Widjaj(2004), transfer dana perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan secara proporsional, demokratis, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban, dan pembagian kewenangan serta cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. transfer dana melalui dana perimbangan diperkirakan akan menyebabkan peranan pengelolaan fiskal pemerintah secara umum akan semakin berkurang. Sebaliknya proporsi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam (Widjaja,2004:42). Maka dengan adanya dana transfer dari pusat akan menyebabkan belanja daerah akan semakin meningkat pula karena tambahan pendapatan dari pusat.

Berdasar penjelsan diatas menunjkan bahwa dana trasfer merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam memenuhi belanja daerah. Dana trasfer dari pusat sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian daerah, semakin banyak dana trasfer yang diperleh maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat dalam menuhi belanjanya. Maka hal ini mengidikasi bawa terdapat hubungan antra pemberian dana tranfer dengan alokasi pengaluaran daerah melalui alokasi belanja modal .

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Mengacu pada teori keagenan, sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Mahmudi,2007:84). Jika nilai efisiensi tinggi, maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi. Dalam konteks efisiensi dan efektivitas anggaran, maka pemanfaatan anggaran secara sederhana dapat dikatakan bertujuan untuk memberikan efek kepada peningkatan kualitas layanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal yang menjadi kepentingan masyarakat pada umumnya (Chalid, 2005).

Setelah digulirkannya masa desentralisasi fiskal pada masing-masing daerah diharapkan daerah mandiri secara keuangan dalam mengurus pembiayaan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemampuan keuangan juga merupakan informasi yang penting terutama untuk menuai kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/ kemandirian daerah dalam otonomi daerah.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, indikator alokasi belanja modal diukur dengan rumus:

$$\text{Alokasi belanja modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Dalam APBD}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.2)$$

6. Keuangan Daerah

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah “ semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Karena keuangan daerah tersebut berasal dari dana publik, sehingga pengelolaan keuangannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik buruknya kondisi keuangan daerah akan berhubungan dengan bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang telah dilakukan pemerintah daerah. Bagaimana Pemda mengelola keuangan daerahnya untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah

Menurut Halim (2004: 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu fungsi utama anggaran sektor publik adalah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, yang artinya anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Halim, 2004: 84). Melalui anggaran sektor publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

7. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang direncanakan (Sularso dan Restianto, 2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)No.13 tahun 2006 menyebutkan kinerja sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Oesi Agustina (2013:3) Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2002:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja,

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.

- b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan (Sularso dan Restianto, 2011). Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi Fskal

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat

desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah antara lain rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah bantuan pusat harus seminimal mungkin,. Olah karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Derajat desentralisasi dihitung dengan formula sebagai berikut (Halim, 2004):

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.3)$$

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase Pad Terhadap Tpd	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

b. Ketergantungan Keuangan Daerah

Dana transfer (dana perimbangan) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, hal tersebut konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Ketergantungan keuangan dihitung dengan formula sebagai berikut (Halim,2004).

$$\text{Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Trasfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.4)$$

Tabel 2.2
Skala Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan Keuangan	Persentase (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

c. Efektifitas PAD

Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan daerah merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Rasio efektifitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

Namun demikian, semakin tinggi Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan .Apabila persentase kinerja keuangan di atas 100 persen dapat dikatakan sangat efektif, 90 - 100 persen adalah efektif, 80 – 90 persen adalah cukup efektif, 60– 80 persen adalah kurang efektif dan kurang dari 60 persen adalah tidak efektif.Rasio efektifitas dihitung dengan formula sebagai berikut (Halim,2004):

$$Efektifitas\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD} \times 100\% \dots \dots \dots (2.5)$$

Tabel 2. 3
Kriteria Penilaian Efektifitas Keuangan

Efektifitas Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
Dibawah 60	Tidak efektif

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memerlukan kajian terdahulu atau penelitian empiris yang sejenis untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan. Dimana nantinya dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat apakah yang dilakukan mendukung dengan penelitian yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya.

Nama/ Judul Penelitian	Variabel Terikat	Variabel Bebas	Hasil Penelitian
Rudi Aryanto(2011) “ analisis kemampuan kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kabupaten wonogiri 2009-2011”	Pertumbuhan ekonomi	Rasio kemampuan dan kemandirian daerah	Rasio kemampuan keuangan daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, seangkan rasio kemandirian keunagan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Ardi Hamzah,2007 “ analisis kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran	Kinerja keuangan	Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran	Rasio kemandirian 1, rasio kemandirian 2, rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Greydi Normala Sari, Paulus Kindangen, Tri Oldy Rotinsulu “ Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014	Kinerja keuangan daerah	Pertumbuhan ekonomi	Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa rasio kemandirian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan hal ini telah sesuai dengan teori
Lilis marlina, dkk. Kinerja keuangan dan alokasi belanja modal di provinsi Aceh (2010-2014)	Kinerja keuangan daerah	Alokasi belanja modal	Kinerj keuangan derajat desentralisasi fiskal,ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, dan efektifitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

Berdasarkan penelitian yang relevan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja keuangan daerah seperti kemandiran keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio ketrgantungan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan hal ini telah sesuai teori.

Perbedaan penelitian- penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penulis menggunakan analisis regresi linier berganda, dan juga penulis mengambil kasus di tempat yang berbeda. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama meneliti tentang kinerja keuangan daerah.

C. Kerangka Konseptual

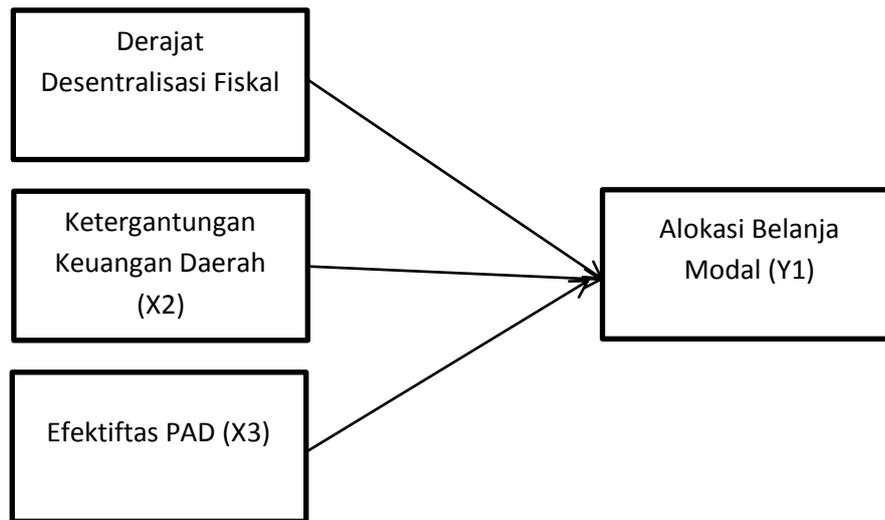
Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan keterkaitan maupun antara variabel yang diteliti berpijak dari teori yang dikemukakan pada kajian teori di atas. Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas dimana variabel bebas adalah derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD. Sedangkan sebagai variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal .

Diberlakukannya desentralisasi fiskal merupakan dampak diterapkannya otonomi daerah, dimana dalam otonomi daerah, daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga di daerahnya sendiri. Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Jika PAD suatu daerah meningkat maka daerah akan melakukan pengoptimalan dalam belanja modal berupa pembangunan infrastruktur untuk layanan publik, dengan adanya infrastruktur yang baik maka investasi pun akan meningkat, sehingga dengan adanya investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

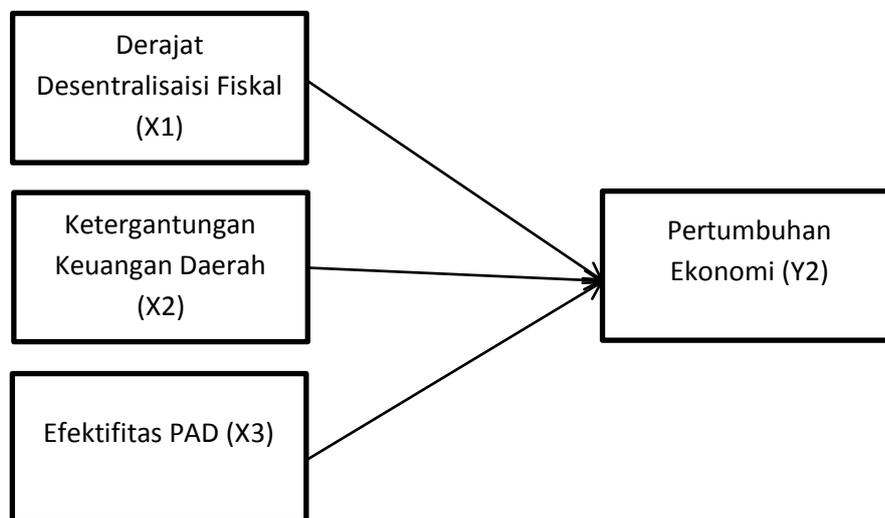
Ketergantungan keuangan pemerintah daerah ditunjukkan dengan seberapa besar transfer pusat terhadap total keseluruhan pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini membuktikan bahwa semakin besar daerah bergantung pada pusat, Penerimaan pendapatan daerah dapat berupa dana perimbangan yaitu dana transfer dari pusat yang dijadikan insentif dalam penerimaan daerah. Dana transfer yang semakin menurun dapat dikatakan bahwa daerah semakin mandiri sehingga dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%.

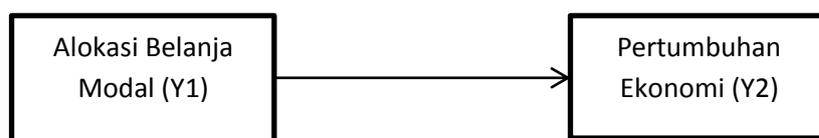
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan, penambahan, dan pengelolaan aset atau inventaris daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dengan lancar apabila mendapat infrastruktur dan pelayanan umum yang memadai dari pemerintah. Dengan terlaksananya belanja modal maka akan meningkatkan perekonomian daerah.



Gambar 2: Kerangka Konseptual Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal



Gambar 3: Kerangka Konseptual Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 4: Kerangka Konseptual Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dari penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan, dan efektifitas PAD secara parsial berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

$$H_0 : \beta_1 \beta_2 \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \beta_2 \beta_3 \neq 0$$

2. Derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan, dan efektifitas PAD secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

$$H_0 : \beta_1 \beta_2 \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \beta_2 \beta_3 \neq 0$$

3. Alokasi belanja modal berpengaruh t positif terhadap pertumbuhan ekonomi

$$H_0 : \beta_5 = 0$$

$$H_a : \beta_5 \neq 0$$

4. Derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan, efektifitas PAD secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien regresi } \beta_i \neq 0$$

5. Derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan, efektifitas PAD secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien regresi } \beta_i \neq$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal(X1) secara parsial berpengaruh positif signifikan dengan nilai probabilitas $0.0159 < 0.05$ terhadap belanja modal, Ketergantungan keuangan daerah(X2) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan probabilitas sebesar($\alpha=0.0707$) terhadap belanja modal, dan Efektifitas PAD(X3) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan probabilitas sebesar 0.5604 terhadap belanja modal Di Sumatera Barat.
2. Derajat Desentralisasi Fiskal(X1) secara parsial berpengaruh negatif signifikan dengan nilai probabilitas $0.005 < 0.05$ terhadap pertumbuhan ekonomi, Ketergantungan keuangan daerah(X2) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan probabilitas sebesar($\alpha=0.4825$) terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Efektifitas PAD(X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan dengan probabilitas sebesar $0.0124 < 0.05$ terhadap pertumbuhan ekonomi Di Sumatera Barat.
3. Belanja modal(Y1) berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas sebesar $0.0009 < 0.05$.
4. Derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Kota di Sumatera Barat dengan nilai $8.462293 > F_{tabel} = 2,72$, Artinya, secara bersama-sama terdapat pengaruh yang

signifikan derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

5. Derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Barat dengan nilai $11.30984 > F_{tabel} = 2,72$. Artinya, secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan efektifitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dan hasil dari penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

Bagi pemerintah daerah

- a. Derajat desentralisasi fiskal

Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, hendaknya untuk lebih menggali potensi –potensi daerah sehingga dapat meningkatkan PAD dalam era otonomi daerah ini karena dengan menggali potensi daerah yang ada yaitu dengan cara memaksimalkan peningkatan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang masih mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan untuk memaksimalkan PAD sebagai pendapatan daerah utama untuk melaksanakan kewenangan daerah, dengan peningkatan PAD ketergantungan pemerintah daerah terhadap

pemerintah pusat dapat dihilangkan sehingga tujuan desentralisasi fiskal dapat terwujud dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

b. Ketergantungan keuangan daerah

Pemerintah kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menghilangkan ketergantungan terhadap dana perimbangan, dengan terus dilakukan upaya peningkatan PAD untuk membiayai belanja langsung, karena dengan berkurangnya ketergantungan terhadap dana perimbangan pusat maka menunjukkan pemerintah daerah lebih mandiri dalam membiayai program dan kegiatan pelaksanaan pemerintah daerah.

c. Efektifitas PAD

Pemerintah kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat diharapkan untuk lebih meningkatkan realisasi PAD yang besar daripada anggaran yang telah ditetapkan dengan cara pemerintah daerah harus meningkatkan dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi, seperti meningkatkan peran BUMD untuk meningkatkan PAD sehingga pada realisasi pendapatan menjadi lebih efektif .

d. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas indikator kinerja keuangan daerah yang lebih luas sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan membandingkan hasil penelitian dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menilai sesuai atau tidak antara kebijakan yang disusun dengan penerapannya

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2005. *“Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Adi, Priyo Hari, Dan Harianto, David. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita*. Makasar : Simposium Nasional Akuntansi X.
- Agustina, Oesi, (2013). *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Jurusan IlmuEkonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Akai, N. And Sakata, M. 2002. Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence Form State-Level Cross-Section Data For The United States. *Journal Of Urban Economics*, 52:93-108.
- Amagoh F, Amin AA. 2012. *An Examination Of The Impacts Of Fiscal Decentralization On Economic Growth*. International Journal Of Business Administrastion. 2(6):2012.
- Anasmen. 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat 2000-2006*. Tesis Program MPKP. Universitas Indonesia.
- Astuti, Wuku. 2011. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kab/Kota Pulau Jawa*. Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013s/d 2016. *Statistik Keuangan Daerah Sumatera Barat : BPS Sumbar*.
- Bahrul, Ulum Rusydi.2010.” Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studikamus Provinsi Di Indonesia Tahun 2005-2008)”. Skripsi.
- Conceptual Framework Task Force.(2012). *Measuring Financial Performance In Public Sector Fiancial Statement*. Consultation Paper 2
- Darwanto Dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Simposium Nasional Akuntansi X.
- Fozzard, A (2001). *The Basic Budgetting Problem Approaches Toresource Allocation In The Public Sector And Their Implication For Pro-Poor Budgetting*. Growth, And Democratic Governance". *Working Paper*, Oktober, 1-41